

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Batam merupakan wilayah terbesar yang berada di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terbagi menjadi beberapa seperti Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang serta terdapat pulau-pulau kecil lainnya dikawasan selat Singapore dan Selat Malaka. Menurut catatan Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Batam per 2015, terdapat sekitar 1.037.187 jiwa penduduk Kota Batam.

Kota Batam merupakan kota yang memiliki letak yang strategis. Selain letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional, Kota Batam juga berbatasan langsung dengan negara Singapore dan Malaysia. Kota ini memiliki luas wilayah mencapai 1.575 km. Maka tidak heran Kota Batam menjadi salah satu kota yang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan yang terjadi membuat banyaknya aktivitas pergerakan kegiatan yang terjadi sehingga Kota Batam memerlukan suatu sistem pergerakan seperti transportasi.(JDIH.Kota Batam, n.d.)

Transportasi merupakan sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memindahkan manusia, hewan, maupun barang dari tempat satu ke tempat lainya dengan menggunakan bantuan dari hewan maupun mesin yang diatur oleh manusia. Pada hakikatnya transportasi digunakan oleh manusia untuk mempermudah dan mempercepat suatu kegiatan yang dijalankan dalam setiap aktivitasnya.

Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas memadai, tertata, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Demi mendapatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang ada di Kota Batam, maka setiap kendaraan bermotor umum harus dilakukan uji teknis dan layak jalan sebagai persyaratan beroperasi. Kota Batam sendiri memiliki banyak jenis angkutan umum yang beroperasi seperti Bus kota, Bus Trans Batam, dan Metro tras, non trayek Taksi. Angkutan umum di Kota Batam juga memiliki aturan dalam melakukan layak jalan dan dapat beroperasi di jalan, Sebagai bentuk gambaran jumlah angkutan yang layak operasi dan sudah habis masa operasi yang ada di Kota Batam dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut.

REKAPITULASI JUMLAH ANGKUTAN TRAYEK CABANG DI KOTA BATAM			
1. Jumlah Total Kendaraan Angkutan Trayek Cabang : 1745 unit			
2. Jumlah Kendaraan Telah Habis Usia Operasi berdasarkan tahun : 1603 unit			
3. Jumlah Kendaraan Yang Masih Layak Operasi berdasarkan tahun : 142 unit dengan rincian sebagai berikut :			
a. Habis Usia Operasi		b. Layak Usia Operasi	
- Tahun 1986 -1994	: 36 unit	- Tahun 2006	: 30 unit
- Tahun 1995	: 118 unit	- Tahun 2007	: 16 unit
- Tahun 1996	: 197 unit	- Tahun 2008	: 10 unit
- Tahun 1997	: 356 unit	- Tahun 2009	: 12 unit
- Tahun 1998	: 77 unit	- Tahun 2010	: 19 unit
- Tahun 1999	: 37 unit	- Tahun 2011	: 15 unit
- Tahun 2000	: 119 unit	- Tahun 2012	: 16 unit
- Tahun 2001	: 358 unit	- Tahun 2013	: 15 unit
- Tahun 2002	: 81 unit	- Tahun 2014	: 8 unit
- Tahun 2003	: 97 unit	- Tahun 2015	: 1 unit
- Tahun 2004	: 67 unit	Jumlah	: 142 unit
- Tahun 2005	: 60 unit		
Jumlah	1603 unit		

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Angkutan Kota Batam

(sumber: situs Dinas Perhubungan Kota Batam)

Berdasarkan gambar diatas terkait banyaknya jumlah angkutan yang sudah direkapitulasi oleh Dinas Perhubungan, dapat disimpulkan bahwa dari jumlah

angkutan 1745 unit hanya sekitar 142 yang masih layak operasi. maka perlunya peningkatan dalam kinerja pelayanan dalam pengujian kendaraan. Keberhasilan meningkatkan kinerja pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya instansi pada pelayanan transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam yang dituntut langsung oleh masyarakat untuk mewujudkan pelayanan dan semakin meningkatkan kinerja pelayanan. Akan tetapi masih banyak ditemukan prosedur dari Dinas Perhubungan yang tidak sesuai sehingga membuat masyarakat enggan melakukan kewajibannya melakukan pengujian kendaraan.

Permasalahan yang terjadi banyaknya supir angkutan yang tidak mau melakukan pengujian kendaraan. Mengakibatkan banyaknya masalah yang tidak diinginkan seperti banyaknya kasus kecelakaan, maka perlunya peningkatan peran Dinas Perhubungan sebagai aparat yang memang berperan langsung dalam pelaksanaan pengujian kendaraan. Dikutip dari Batamtoday, pada kasus kecelakaan terjadi pada senin 17 februari 2020 angkutan umum jenis bus kota BP 7601 DU kecelakaan lalulintas di jalan Letjen R. Suprpto (bukit daeng) Batu Aji Kota Batam, yang menabrak dua sepeda motor dan satu orang meninggal dunia supir angkutan umum tersebut di vonis lima tahun penjara. Dipastikan tidak mengikuti uji layak jalan, karena setelah dilakukan pengamatan ternyata angkutan tersebut lampu penerangan mati, tidak dilengkapi lampu sen, dan rem depan dan belakang tidak berfungsi secara normal.

Penyebab dari kecelakaan tersebut dikarenakan kondisi angkutan yang tidak layak turun kejalan, dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kurang

maksimalnya pelaksanaan prosedur kinerja dari instansi Dinas Perhubungan serta kesadaran dari sumber daya manusia itu sendiri. Dilansir dari surat kabar pada jumat 21 febuari 2020 salah satu sumber, bapak Lamsihar mengungkapkan berkaitan dengan uji KIR, selama dua tahun belakangan ini sekitar 60% dari 72 unit mobil tidak melakukan uji KIR. Penyebabnya dikarenakan sikap dari intansi pemerintahan Dinas Perhubungan yang tidak memiliki komitmen dalam pelaksanaannya. Dimana banyak kendaraan yang digunakan sebagai taksi online tidak melakukan uji kir tetapi tetap beroperasi, sehingga membuat para supir angkutan enggan melakukan uji kir. Belum lagi para pendedara juga mengalami tekanan untuk mendapatkan setoran, sehingga menyebabkan permasalahan yang memang tidak diinginkan (Trinbun.News, 2020). Disini saja bisa kita lihat bahwa ketidak inginan masyarakat dalam pengujian begitu nyata terlihat.

Harapannya dengan mengetahui fenomena masalah di lapangan terkait kinerja pelayanan Dinas Perhubungan di Kota Batam, maka akan diketahui seberapa tinggi tingkat kinerja layanan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan jenis angkutan umum di Kota Batam. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah, diharapkan lembaga/instansi di Indonesia semakin memperhatikan dalam menyediakan akses layanan guna memenuhi kebutuhan konsumen yaitu dengan menyediakan kinerja pelayanan yang maksimal. Dinas Perhubungan dalam hal ini wajib menerapkan pengujian terhadap kendaraan jenis angkutan umum. Kinerja pegawai menjadi suatu hal yang penting dalam mempertahankan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Seluruh kegiatan lembaga yang akan berakhir kepada masyarakat

mengenai kepuasan yang dirasakan. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan umum di Kota Batam.

Mengutip dari jurnal Erick Timpal mengatakan bahwa aspek terpenting dalam melakukan pelayanan publik yaitu dengan cara mengukur kualitas serta kuantitas kerja dari seseorang aparatur pegawai, dimana dalam pelaksanaan kegiatan dan jumlah siklus kegiatan dapat terimplementasikan dengan sempurna. Sehingga kinerja pegawai mampu mempengaruhi kualitas pelayanan terutama pada lembaga pemerintahan yang bertujuan utama untuk memberikan pelayanan pada masyarakat/publik (Publik, 2020). Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya diatas dan juga terdapat fenomena dari adanya penurunan kinerja lebih khususnya adalah dalam memberikan kualitas pelayanan pada Dinas Perhubungan di Kota Batam. berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Jenis Angkutan Umum di Kota Batam.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja dinas perhubungan dalam pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan umum di Kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan dalam pelayanan pengujian kendaraan angkutan umum di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yaitu:

1. Menganalisis kinerja dinas perhubungan dalam pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan umum di Kota Batam.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja dinas perhubungan dalam pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan umum di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam pada Ilmu Administrasi Publik terutama tentang konsep Manajemen Pelayanan Publik, Good Government, dan Kajian Birokrasi Publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dan dinas-dinas terkait dalam meningkatkan inovasi kinerja khususnya pelayanan pengujian kendaraan oleh Dinas Perhubungan di Kota Batam
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta pengetahuan Kepada peneliti selanjutnya khususnya berkaitan dengan pelayanan publik.
 - c. pelayanan publik kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Batam.

